

ANALISIS IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA: ANTARA KEBIJAKAN DAN REALITAS DI LAPANGAN

Hasriani^{1*}, Firman Umar², Fediyatun Muntazarah³, Mustari⁴, Muhtar⁵

¹Universitas Negeri Makassar, Indonesia, email: hasriani@unm.ac.id

²Universitas Negeri Makassar, Indonesia, email: firmanumar@unm.ac.id

³Universitas Negeri Makassar, Indonesia, email: mustari6508@unm.ac.id

⁴Universitas Negeri Makassar, Indonesia, email: fediyatunmuntazarah@unm.ac.id

⁵Universitas Negeri Makassar, Indonesia, email: muhtar@unm.ac.id

Info Artikel

Received: 02 Juni 2026

Accepted: 04 Juni 2026

Published: 08 Juni 2026

Keyword:

Inclusive Education; Inclusive School; Policies

Kata Kunci:

Pendidikan inklusif; Pendidikan Sekolah; Kebijakan

Abstract

Inclusive education in Indonesia aims to ensure equal access to education for all learners, including children with special needs. This article analyzes the gap between policy and its implementation through a literature study. The findings show that although regulations are supportive, implementation is still constrained by limited teacher competence, inadequate facilities, and low public understanding. It is concluded that collaboration among stakeholders is needed to improve the effectiveness of inclusive education so that it can be more equitable and optimal.

Abstrak

Pendidikan inklusif di Indonesia bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Artikel ini menganalisis kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya melalui studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi mendukung, implementasi masih dibatasi oleh kompetensi guru yang terbatas, fasilitas yang tidak memadai, dan pemahaman masyarakat yang rendah. Disimpulkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif sehingga dapat lebih adil dan optimal.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, hal ini merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata salah satunya dilakukan melalui penerapan pendidikan inklusi. Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif dimaknai sebagai sistem pembelajaran yang membuka peluang seluas- luasnya bagi seluruh siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan maupun yang memiliki kelebihan potensi, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang sama tanpa adanya pemisahan. Secara konsep, sistem ini mencerminkan nilai kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Namun, dalam praktiknya, penerapan pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak sekolah yang secara administratif telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, tetapi belum sepenuhnya mampu melaksanakan prinsip-prinsip inklusivitas secara optimal. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, keberadaan pendidikan inklusi juga merupakan bentuk implementasi dari Tujuan Namun, dalam praktiknya, penerapan pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak sekolah yang secara administratif telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, tetapi belum sepenuhnya mampu melaksanakan prinsip-prinsip inklusivitas secara optimal. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, keberadaan pendidikan inklusi juga merupakan bentuk implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-4 yang menekankan pada pentingnya pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil untuk semua lapisan masyarakat. Di Indonesia, semangat ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi apapun, baik dari segi kondisi fisik, mental, intelektual, maupun sosial

Namun, jika dilihat lebih dalam, perjalanan penerapan pendidikan inklusi di Indonesia tidaklah semudah yang dibayangkan. Meskipun sudah ada payung hukum yang jelas, namun perubahan pola pikir, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan fasilitas yang memadai membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan konsep ini secara menyeluruh, sehingga kesenjangan antara harapan dan kenyataan masih terasa sangat nyata hingga saat ini. Oleh karena itu, kajian mengenai hal ini menjadi sangat penting dilakukan agar dapat memberikan gambaran yang jelas .

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia, terutama untuk melihat perbedaan antara kebijakan yang ada dengan kondisi nyata di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai referensi tertulis, meliputi hasil penelitian terdahulu, buku referensi, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan inklusi. Data tersebut kemudian dikaji dan dianalisis secara deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pendidikan inklusi diterapkan dalam praktik.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Menurut Sugiyono (2017), metode ini menekankan pada penggunaan data sekunder yang berupa landasan teori maupun hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan secara luas. Metode ini membantu peneliti dalam menyusun dasar teori serta memperkuat analisis terhadap masalah yang diteliti.

Lebih lanjut, Moleong (2007) menambahkan bahwa metode kualitatif memiliki keunggulan dalam mengungkap makna dan memahami fenomena sosial secara mendalam, sehingga sangat sesuai digunakan untuk meneliti kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, metode ini dianggap tepat untuk mengkaji pelaksanaan pendidikan inklusi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ditinjau dari aspek kebijakan yang berlaku maupun realitas yang ada di masyarakat..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor pertama dan yang paling utama adalah belum memadainya kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik. Sebagai besar guru di sekolah reguler belum mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus mengenai cara menangani siswa berkebutuhan khusus. Padahal, guru merupakan ujung tombak yang langsung berinteraksi dengan siswa sehari-hari.

Hal ini sejalan dengan pendapat Heward (2003), yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengelola kelas yang beragam. Tanpa bekal pengetahuan dan Keterampilan yang cukup, Guru akan kesulitan memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak

Banyak guru yang mengaku hanya mengandalkan pengalaman pribadi saja dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, karena pengetahuan yang didapatkan saat pendidikan sarjanapun masih sangat minim. Akibatnya, metode

yang digunakan seringkali tidak tepat, sehingga siswa menjadi kurang termotivasi dan prestasi belajarnya pun ikut menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas utama jika ingin pendidikan inklusi berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Pendukung, Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang belum memenuhi standar. Banyak sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, namun secara fisik belum memiliki sarana yang ramah dan mendukung, mulai dari alat bantu belajar, aksesibilitas bangunan, hingga bahan ajar yang khusus. Padahal, kenyamanan dan kemudahan akses sangat berpengaruh terhadap semangat belajar siswa.



Gambar 1. Guru & Murid

Menurut Mumpuniarti (2007), kelengkapan fasilitas dan aksesibilitas merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Jika sarana prasarana tidak tersedia dengan baik, maka proses pembelajaran akan terhambat dan tujuan pembelajaran sulit untuk tercapai secara maksimal. Selain fasilitas fisik, ketersediaan media pembelajaran yang sesuai juga menjadi hal yang sangat penting. Misalnya, untuk siswa dengan gangguan penglihatan dibutuhkan buku braille atau alat bantu visual, sedangkan untuk siswa dengan gangguan pendengaran dibutuhkan alat bantu dengar dan media pembelajaran visual yang menarik. Namun kenyataannya, sebagian besar sekolah belum memiliki kelengkapan tersebut. Fasilitas yang lengkap dan memadai berperan sebagai pendukung utama yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Ketika siswa merasa nyaman dan semua kebutuhan pendukungnya tersedia, maka konsentrasi dan semangat belajarnya akan meningkat. Sebaliknya, jika fasilitas tidak ada atau kurang memadai, siswa akan merasa kesulitan bahkan enggan untuk datang ke sekolah. Oleh karena itu, penyediaan sarana prasarana tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele, melainkan harus dipandang sebagai kebutuhan utama yang wajib dipenuhi oleh pihak sekolah maupun pemerintah.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, baik dari segi kesiapan guru maupun ketersediaan fasilitas, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa hasil akhir yang didapatkan di lapangan masih jauh dari kata ideal. Meskipun secara kebijakan dan aturan sudah sangat bagus dan mendukung, namun pada praktiknya implementasi pendidikan inklusi ini masih menemui banyak jalan buntu yang membuat tujuan utamanya menjadi belum sepenuhnya tercapai. Dampak paling nyata yang dirasakan adalah terjadinya ketidakadilan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Ketika guru belum memiliki kompetensi yang cukup dan sarana pendukung belum tersedia dengan baik, maka proses belajar mengajar tidak bisa berjalan secara efektif dan Efisiensi. Siswa yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisinya, justru harus mengikuti sistem yang sama persis dengan siswa pada umumnya tanpa adanya penyesuaian yang memadai. Hal ini tentu sangat memberatkan dan membuat mereka kesulitan untuk memahami materi pelajaran dengan baik.



Gambar 2. Murid

Selain itu, kondisi ini juga berakibat pada terhambatnya pengembangan potensi yang dimiliki oleh siswa. Setiap anak pada dasarnya memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, namun jika lingkungan belajar dan cara mengajarnya tidak mendukung, maka potensi emas tersebut tidak akan bisa keluar dan berkembang secara maksimal. akibatnya, siswa menjadi tertinggal, kurang percaya diri, dan pada akhirnya tidak bisa merasakan manfaat pendidikan secara utuh sebagaimana yang diharapkan dalam konsep inklusi itu sendiri.

Jadi, dapat dikatakan bahwa kendala-kendala yang ada tersebut bukan hanya masalah teknis semata, melainkan sudah menyentuh pada aspek esensial yaitu kualitas pendidikan itu sendiri. Tanpa adanya perbaikan yang serius terkait sumber daya manusia dan infrastrukturnya, maka pendidikan inklusi di Indonesia akan sulit memberikan hasil yang optimal dan hanya akan menjadi program yang berjalan secara formalitas tanpa makna yang mendalam bagi masa depan anak-anak didik.

Dampak lain yang juga tidak kalah penting adalah terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Sekolah yang berada di kota besar cenderung memiliki fasilitas dan guru yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang berada di daerah pedesaan atau terpencil. Akibatnya, siswa berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah pelosok mendapatkan layanan

pendidikan yang jauh di bawah standar. Hal ini memperparah ketimpangan pendidikan yang sudah ada, sehingga kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik menjadi semakin sulit diraih oleh mereka. Lebih jauh lagi, kondisi ini juga berpengaruh terhadap pandangan masyarakat luas. Ketika pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, banyak orang yang mulai meragukan efektivitas pendidikan inklusi dan berpendapat bahwa siswa berkebutuhan khusus sebaiknya dipisahkan saja di sekolah khusus. Padahal, masalah utamanya bukan pada konsepnya, melainkan pada implementasinya yang belum maksimal. Jika semua komponen pendukung sudah terpenuhi dengan baik, maka pendidikan inklusi akan memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah menciptakan generasi muda yang saling menghargai, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia saat ini masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jauh antara apa yang tertulis dalam aturan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Meskipun pemerintah sudah membuat kebijakan yang sangat baik dan mendukung, namun pada praktiknya masih banyak hambatan yang membuat konsep ini belum bisa berjalan secara maksimal. Dua masalah utama yang menjadi penghambat utama adalah belum memadainya kemampuan dan kesiapan guru dalam menangani siswa yang beragam, serta belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang yang sesuai standar. Kedua hal ini sangat berpengaruh besar terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa. Akibat dari permasalahan tersebut, tujuan utama dari pendidikan inklusi itu sendiri yaitu memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi semua anak pun belum bisa dirasakan sepenuhnya. Proses belajar menjadi kurang efektif, potensi siswa sulit berkembang secara optimal, dan pada akhirnya kualitas hasil pendidikan pun menjadi tidak maksimal.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan adanya perhatian dan tindakan yang serius dari semua pihak yang terlibat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus lebih memperhatikan pemenuhan fasilitas serta rutin memberikan pelatihan kepada guru. Sekolah juga harus lebih terbuka dan berupaya menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua siswa. Keberhasilan pendidikan inklusi tidak akan bisa tercapai hanya dengan mengandalkan aturan di atas kertas saja, melainkan membutuhkan kerjasama yang nyata dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Hanya dengan begitu, cita-cita untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar inklusif, setara, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa dapat terwujud di masa

depan. Selain itu, peran serta orang tua dan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Orang tua diharapkan dapat terus berkomunikasi dengan pihak sekolah dan memberikan dukungan kepada anaknya, sedangkan masyarakat perlu mengubah pola pikir dan menghilangkan stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya kerjasama yang harmonis antara sekolah, pemerintah, keluarga, dan masyarakat, maka segala hambatan yang ada dapat diatasi dengan lebih mudah.

Pada akhirnya, pendidikan inklusi adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh bangsa. Ketika setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka potensi yang dimiliki akan berkembang secara optimal. Anak-anak tersebut nantinya akan tumbuh menjadi individu yang mandiri, produktif, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan negara. Oleh karena itu, upaya mewujudkan pendidikan inklusi yang ideal harus terus diperjuangkan dan tidak boleh berhenti hanya sampai di tengah jalan saja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Makassar atas dukungan dana, fasilitas, serta kepercayaan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar, yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan sosialisasi dan pelatihan berlangsung. Komitmen dan antusiasme Bapak/Ibu guru menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Tidak lupa apresiasi kami sampaikan kepada tim pelaksana, fasilitator, serta mahasiswa pendamping yang telah bekerja keras dalam merancang dan menjalankan seluruh tahapan kegiatan dengan penuh dedikasi. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan dalam penguatan pendidikan kebhinekaan di sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). Panduan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia. Kementerian PPN/ Bappenas RI.
- Heward, W. L. (2003). *Exceptional children: An introduction to special education* (7th ed.). Pearson Education
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mumpuniarti. (2007). *Pelayanan pendidikan inklusif*. UNY Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Kementerian Pendidikan Nasional.

Kemendikbud. (2021). Panduan Praktis Sekolah Damai. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2015). Mengubah dunia kita: Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. PBB.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara RI.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

